

KINERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA

(The Performance of Agricultural Extension Service in Samarinda Regency)

Dina Lesmana

*Program Studi Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman
Telp : (0541)749312; Email : Sosek_unmul@cbn.net.id ; Dina_Sosek@Telkom.net*

ABSTRACT

The study was conducted in Samarinda Regency and aimed at observing performance of Agricultural Extension Service (AES). Primary data were collected through direct interview and field observation using questionnaires from the respondents consisting of 38 field extension workers and 25 of beneficiaries. The data were analyzed using qualitative and quantitative approaches. Performance of The Agricultural Extension Service (AES) was not optimal due lack of responsiveness, responsibility and quality service to farmers.

Key words: performance, responsiveness, responsibility, quality service

PENDAHULUAN

Kelembagaan penyuluhan merupakan faktor determinan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian dan tercapainya tujuan dari pembangunan pertanian. Kelembagaan penyuluhan diperlukan untuk mewadahi proses penyelenggaraan penyuluhan. Sistem penyuluhan yang dulunya hanya terdiri dari sub-subsisten petani, penyuluh dan kelembagaan struktural menjadi subsistem petani, penyuluh, pelaku agribisnis lainnya, lembaga penelitian, pendidikan dan lembaga pelatihan. Penyelenggaraan penyuluhan dilakukan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi. Salah satu mata rantai lembaga penyuluhan yang terdekat dengan masyarakat dan berada di tingkat kecamatan adalah Balai Penyuluhan Peratanian.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan unit penunjang penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang administrasi, pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatannya adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berbagai kegiatan pokok dalam operasional, pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan BPP untuk menunjang penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus berdasarkan ketetapan atau keputusan Bupati/Walikota. Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian dibutuhkan sumber daya manusia dalam hal ini aparat Penyuluh Pertanian Lapangan, sarana prasarana, pendanaan serta status kedudukan lembaga yang kuat agar kinerjanya dapat tepat guna (efektif) dan

berhasil guna (efesien) dalam pencapaian tujuannya.

BPP sebagai sebuah lembaga yang dekat dengan masyarakat peran dan fungsi BPP sangat besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dalam kegiatan operasionalnya BPP terdiri dari sekelompok penyuluh pertanian dari berbagai subsektor dan dikoordinir oleh seorang diantaranya. BPP juga dibantu oleh tim teknis pertanian secara umum. Tim ini terdiri dari Penyuluh Pertanian Spesial (PPS), peneliti, petani pemandu, Lembaga Swadaya Masyarakat, mantri tani, mantri kesehatan hewan dan teknisi pertanian lapangan lainnya.

BPP adalah "home base" bagi kelompok penyuluh pertanian dan desa binaan yang melakukan kontak langsung dengan petani. Penyuluh sebagai staff fungsional di BPP menempati posisi sentral dalam mengaktualisasikan berbagai perannya dan merupakan bagian dari organisasi dan aparatur pemerintah. Dalam kegiatannya BPP berupaya untuk turut aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atas amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas dan fungsi BPP adalah menjamin :

- a. Tersedianya fasilitas untuk menyusun program dan rencana kerja penyuluhan yang tertib
- b. Tersedianya fasilitas untuk menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi dan pasar.
- c. Terselenggaranya kerjasama antara peneliti, PPL, petani/kontak tani-nelayan dan para pelaku agribisnis lainnya.
- d. Tersedianya fasilitas untuk kegiatan belajar dan forum-forum pertemuan bagi petani dan bagi penyuluh.

- e. Tersedianya fasilitas untuk membuat percontohan dan pengembangan model-model usahatani dan kemitraan agribisnis dan ketahanan pangan.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, maka visi utama BPP adalah berupaya memberdayakan petani melalui penyuluhan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralis. Pendekatan ini mengharuskan penyuluh dan lembaganya untuk memperluas sasaran penyuluhannya dengan tidak hanya ke petani dan keluarganya tetapi mencakup para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta semua pelaku agribisnis yang terlibat dalam sistem dan usaha agribisnis. Ditinjau dari sisi materi penyuluhan pertanian di samping menyangkut aspek teknis budidaya, harus pula memberikan perhatian tinggi terhadap aspek ekonomi usaha dan pengembangan organisasi petani agar petani dapat mandiri dan mampu melihat peluang serta perkembangan pasar. Dengan demikian BPP dalam kinerjanya harus melakukan perencanaan melalui program penyuluhan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan petani secara kontekstual serta menjadi fasilitator dan motivator bagi petani dan pelaku agribisnis lainnya dalam mengembangkan usahatannya agar berdaya saing dan komersil.

Kondisi penyuluhan selama dekade terakhir ini banyak mengalami kemunduran, kemandulan dan stagnasi. Hal ini terjadi secara nasional, sehingga maju mundurnya penyuluh dan lembaganya sangat bergantung dari apresiasi dari pemegang kebijakan di masing-masing daerah dalam memahami tugas dan fungsi strategis penyuluhan pertanian dalam membangun sistem dan usaha agribisnis. Beragam bentuk lembaga penyuluhan bahkan ada yang dibubarkan membuat kinerja lembaga dan aparat penyuluhan semakin lesu dalam kegiatannya. Hal ini diperparah dengan ketidakjelasan status lembaga, pendanaan dan sistem pola karier bagi penyuluh, sehingga perlu adanya evaluasi dan monitoring terhadap tugas dan tanggung jawab lembaga penyuluhan selama ini. Apakah eksistensi dari lembaga ini benar-benar diperhatikan ataukah tidak bagi pemerintah Kabupaten/Kota.

Kondisi ini juga dialami oleh penyuluh pertanian dan lembaga penyuluhan Kota Samarinda. BPP adalah lembaga ujung tombak pemerintah yang dekat dengan masyarakat pedesaan. Apakah kondisi nasional juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan di wilayah kerja BPP di Kota Samarinda. Apresiasi pemerintah Kota

Samarinda diperlihatkan melalui misinya untuk meningkatkan kualitas SDM di Samarinda yang salah satunya merupakan tanggung jawab Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda. Namun sejauh ini apakah telah sesuai dengan target/sasaran yang diinginkan ataukah tidak.

Berpijak pada fenomena nasional dan kondisi regional Kota Samarinda dalam melaksanakan penyuluhan pertanian dalam kerangka pemberdayaan petani, maka tulisan ini mencoba menjabarkan sejauhmana kinerja BPP Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Perlu adanya kajian khusus untuk dapat mengetahui tingkat dari responsivitas, tanggungjawab dan kualitas pelayanan penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh BPP di Kota Samarinda.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Balai Penyuluhan Pertanian Kota Samarinda ditinjau dari segi tingkat akuntabilitas kegiatan penyuluhan pertanian berdasarkan indikator responsivitas, tanggungjawab dan kualitas layanan penyuluhan.

METODE PENELITIAN

Kinerja diberi batasan oleh Maier sebagai kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan tugas ataupun suatu pekerjaan (Moh, 1991). Lebih tegas lagi Yeremias mendefinisikan kinerja sebagai tingkat pencapaian hasil. Dalam pengertian yang sama, Atmosudirjo menyatakan bahwa kinerja adalah prestasi kerja dari penyelenggaraan sesuatu (Soebagio, 1998).

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja BPP dalam melakukan tugas dan fungsinya mengacu pada kinerja organisasi publik yang dikemukakan oleh Lenvin dan Dwiyanto *dalam* Luneto (1998). Indikator tersebut meliputi :

- a. Responsivitas, yaitu kemampuan BPP dalam: 1) mengenali kebutuhan petani, 2) menentukan prioritas pelayanan, dan 3) mengembangkan program-program penyuluhan yang sesuai kebutuhan dan aspirasi petani.
- b. Tanggungjawab, yaitu apakah kegiatan BPP sesuai dengan: 1) misi dan tujuan penyuluhan pertanian, 2) program pembangunan pertanian wilayah setempat, dan 3) tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam SKB Mendagri-Mentan No. 54 Tahun 1996 atau SK Mendagri No. 35 Tahun 1999.

- c. Kualitas Pelayanan, yaitu kemampuan BPP dalam: 1) memberikan pelayanan informasi dan penyuluhan yang memuaskan petani, 2) kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada petani, dan 3) ketepatan materi dan teknik pelayanan informasi dan penyuluhan pertanian.

Pengukuran setiap item pertanyaan dilakukan dengan skoring. Jenjang terendah mendapat skor satu dan jenjang tertinggi mendapat skor lima. Skor yang diperoleh merupakan total skor dari seluruh indikator (nilai skala). Total skor digunakan untuk menilai apakah kinerja BPP termasuk dalam kategori tinggi, sedang atau rendah dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

Kinerja Tinggi

A. Responsivitas

1. Sangat tanggap dan peka dalam mengakomodir aspirasi dan mengenali kebutuhan petani,
2. Sesuai antara prioritas pelayanan dan pemecahan masalah dengan kebutuhan masyarakat petani
3. Menyusun rencana dan mengembangkan program-program penyuluhan yang sesuai kebutuhan dan aspirasi petani.

B. Responsibilitas

1. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan misi dan tujuan penyuluhan pertanian,
2. Realisasi kegiatan sesuai dengan program pembangunan pertanian wilayah setempat, dan perencanaan program penyuluhan
3. Tugas dan fungsi lembaga sesuai sebagaimana diatur dalam SKB Mendagri-Mentan No. 54 Tahun 1996 atau SK Mendagri No. 35 Tahun 1999.

C. Kualitas Layanan

1. Memberikan pelayanan informasi dan penyuluhan yang memuaskan petani,
2. Cepat dalam memberikan pelayanan kepada petani, dan
3. Tepat materi dan teknik pelayanan informasi dan penyuluhan pertanian.

Kinerja Sedang

A. Responsivitas

1. Cukup tanggap dalam mengakomodir dan mengenali kebutuhan petani,
2. Kurang sesuai antara prioritas pelayanan dan pemecahan masalah dengan kebutuhan petani
3. Menyusun rencana kerja dan mengembangkan program-program penyuluhan tetapi kurang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi petani.

B. Responsibilitas

1. Pelaksanaan kegiatan cukup sesuai dengan misi dan tujuan penyuluhan pertanian,
2. Realisasi kegiatan cukup sesuai dengan program pembangunan pertanian wilayah setempat, dan perencanaan program penyuluhan
3. Tugas dan fungsi BPP kurang sesuai sebagaimana diatur dalam SKB Mendagri-Mentan No. 54 Tahun 1996 atau SK Mendagri No. 35 Tahun 1999.

C. Kualitas Layanan

1. Memberikan pelayanan informasi dan penyuluhan yang kurang memuaskan petani,
2. Kurang cepat dalam memberikan pelayanan kepada petani, dan
3. Kurang tepat materi dan teknik pelayanan informasi dan penyuluhan pertanian.

Kinerja Rendah

A. Responsivitas

1. Tidak tanggap dalam mengakomodir dan mengenali kebutuhan petani,
2. Tidak sesuai dengan prioritas pelayanan dan pemecahan masalah serta kebutuhan petani
3. Menyusun rencana kerja dan mengembangkan program-program penyuluhan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi petani.

B. Responsibilitas

1. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan misi dan tujuan penyuluhan pertanian,
2. Realisasi kegiatan tidak sesuai dengan program pembangunan pertanian wilayah setempat, dan perencanaan program penyuluhan
3. Tugas dan fungsi BPP tidak sesuai sebagaimana diatur dalam SKB Mendagri-Mentan No. 54 Tahun 1996 atau SK Mendagri No. 35 Tahun 1999.

C. Kualitas Layanan

1. Memberikan pelayanan informasi dan penyuluhan yang tidak memuaskan petani,
2. Tidak cepat dalam memberikan pelayanan kepada petani, dan
3. Tidak tepat materi dan teknik pelayanan informasi dan penyuluhan pertanian.

Kota Samarinda terdiri dari 6 Kecamatan dengan dua BPP yang berkedudukan di Kecamatan Samarinda Utara (BPP Suluh Manuntung) dan di Kecamatan Palaran (BPP Suluh Tani Abadi) dengan lingkup wilayah kerja (WKBPP) masing-masing 3 Kecamatan. WKBPP Suluh Manuntung meliputi Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Ilir dan

Kecamatan Samarinda Ulu sedangkan lingkup WKBPP Suluh Tani Abadi meliputi Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Palaran. Responden untuk mengetahui kinerja BPP di Kota Samarinda diperoleh secara *purposive*. Responden untuk para *stakeholders* dan *beneficiaries*, yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda, Kepala Bidang SDM dan Penyuluhan, Kasie Penyuluhan, Kepala BLPP dan Wakil, Camat tempat kedudukan BPP, Lurah dan KTNA/masyarakat. Jumlah responden untuk pihak terkait dengan BPP dan petani adalah 25 orang. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan tabulasi silang. Analisis data menggunakan parameter skoring, persentase, nilai maksimum, minimum dan rata-rata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil survey melalui wawancara menggunakan kuesioner terhadap 25 responden utama dan hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian maka diperoleh gambaran kinerja BPP Kota Samarinda yang diukur melalui 3 indikator kinerja (responsivitas, responsibilitas dan kualitas pelayanan). Jika dilihat dari indikator responsivitas, kinerja BPP selama ini masih mengalami beberapa kendala dalam memahami kebutuhan dan aspirasi petani melalui kelembagaan yang ada di petani. Mengingat selama ini kemunculan lembaga lebih didominasi oleh kepentingan-kepentingan yang bukan bersumber dari masyarakat akan tetapi dari keinginan pemerintah dengan sistem *top downnya*. Kenyataan ini menyebabkan kurang berperannya lembaga-lembaga penunjang secara mandiri, karena kebanyakan kelembagaan petani hanya bersifat proyek tanpa didasari oleh keinginan dan kebutuhan petani. Selain itu petani belum mampu secara mandiri maupun swadaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan yang ada untuk dapat merubah orientasi usahatani karena selama ini terbiasa dengan bantuan dan subsidi, sehingga ketika bantuan dan subsidi tidak lagi diberikan kelembagaan yang ada mengalami stagnasi (tidak aktif) bahkan dibubarkan.

Dalam penentuan prioritas pelayanan informasi dan penyuluhan pertanian selama ini masih didominasi dan didasarkan pada target program/proyek pembangunan pertanian seperti program peningkatan mutu intensifikasi (PMI), sedangkan penggalan aspirasi dan kebutuhan petani masih relatif terbatas, sehingga prioritas pelayanan informasi dan penyuluhan yang

selama ini dijalankan tidak menjawab apa yang dibutuhkan petani tetapi apa yang diinginkan oleh instansi.

Dalam hal program/kegiatan di BPP Kota Samarinda dinilai cukup dinamis dengan mengadakan temu koordinasi penyuluh yang diadakan satu kali sebulan di BPP, temu lapang, latihan dan kursus serta temu usaha. Selain itu secara periodik penyuluh masih cukup aktif melaksanakan kunjungan ke kelompok tani dan insidental sesuai keperluan.

Responsibilitas BPP, koordinasi dan kerjasama antara BPP dengan instansi dalam hal ini Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda dapat berjalan, namun belum optimal. Indikasi adanya koordinasi dan kerjasama adalah adanya dukungan pembinaan dari dinas dalam pelatihan bagi penyuluh dan petani dan adanya dukungan fasilitas mobilitas dan operasional bagi penyuluh pertanian.

Program/kegiatan BPP cukup sesuai dengan misi, tujuan penyuluhan yaitu pengembangan SDM petani dan alih teknologi, yaitu melalui pemberdayaan UPJA selama 2 hari, pemasyarakatan anjuran teknologi, dan pelatihan teknologi budidaya.

Indikator Kualitas Pelayanan BPP, Kemampuan BPP dalam hal ini melalui penyuluh pertanian dalam merespon kebutuhan petani di desa binaan, terutama dalam aspek teknis yaitu dengan pembinaan teknis yang sesuai dengan metode, ketersediaan dana, sarana/bahan serta sesuai dengan karakteristik masyarakat tani setempat seperti dalam hal tingkat pendidikan yang relatif rendah. Untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai masing-masing indikator maka dijabarkan sebagai berikut :

Responsivitas

Berdasarkan hasil analisis terhadap kinerja BPP Kota Samarinda pada Tahun 2005 diperoleh skor penilaian terhadap kinerja BPP Kota Samarinda berdasarkan indikator responsivitas adalah pada kategori sedang (68% atau 17 dari 25 responden). Skor penilaian terhadap kinerja per item dari indikator responsivitas BPP disajikan pada Tabel 1.

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa :

1. Responsivitas dalam mengenal kebutuhan petani BPP Kota Samarinda termasuk dalam kategori sedang (76% atau 19 dari 25 responden).
2. Responsivitas dalam menentukan prioritas BPP Kota Samarinda termasuk dalam kategori sedang (60% atau 15 dari 25 responden).

3. Responsivitas dalam mengembangkan program/kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi petani setempat BPP Kota Samarinda berada pada kategori seimbang antara rendah dan sedang (44% dari 11 responden)

Tabel 1. Distribusi hasil penilaian responden terhadap kinerja BPP Kota Samarinda indikator responsivitas kinerja, 2005

Kategori Kinerja	Responsivitas						Total	
	A _{1,2}		A ₂		A ₃		Σ	%
	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Tinggi	1	8	4	16	3	12	3	12
Sedang	19	76	15	60	11	44	17	68
Rendah	5	20	6	24	11	44	5	20
Jumlah	25	100	25	100	25	100	25	100

Cukup sesuainya aspek responsivitas diindikasikan dengan kemampuan para penyuluh dalam mengidentifikasi aspirasi kebutuhan petani dan penyusunan rencana kerja yang mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan petani yang masih dalam kategori sedang. Identifikasi kebutuhan dilakukan dengan pelaksanaan *impact point* yang sifatnya teknis, sosial maupun ekonomi.

Beragamnya kebutuhan petani menuntut penyuluh harus jeli dan peka terhadap kebutuhan yang memang merupakan prioritas untuk dipenuhi. Memprioritasan kebutuhan dilakukan dengan menyusun berdasarkan kemampuan untuk mengatasi permasalahan dan pemilahan terhadap kebutuhan yang memerlukan upaya tidak lanjut dan koordinasi dengan dinas/instansi terkait. Dalam hal rencana dan program kerja/kegiatan di WKBPP selama ini masih disusun dengan mengacu pada program dinas-dinas sub sektor. Hal ini kurang berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari karena keputusan pelaksanaan program tidak mewakili kepentingan petani. Penyuluh harus dapat menyusun rencana kerja yang tepat yang dapat mewakili kepentingan petani dan yang tidak mengabaikan program pemerintah. Perlu rencana kerja penyuluh di BPP yang dapat mencerminkan dan menjawab permasalahan yang ada ditingkat petani dan disesuaikan dengan program pemerintah dengan tidak mengabaikan pula rencana kerja yang sesuai dengan potensi sumberdaya daerah binaannya.

Responsibilitas

Berdasarkan hasil analisis terhadap responsibilitas kinerja BPP Kota Samarinda pada Tahun 2005 diperoleh skor penilaian pada kategori sedang (68% atau 17 dari 25 responden). Skor penilaian terhadap kinerja

indikator responsivitas BPP disajikan pada Tabel 2 .

Tabel 2. Distribusi hasil responden terhadap kinerja BPP Kota Samarinda indikator responsibilitas kinerja, 2005.

Kategori Kinerja	Responsibilitas						Responsi-bilitas	
	B ₁		B ₂		B ₃		B	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Tinggi	2	8	3	12	18	72	7	28
Sedang	16	64	11	44	2	8	17	68
Rendah	7	28	11	44	5	20	1	4
Jumlah	25	100	25	100	25	100	25	100

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa :

- 1) Responsibilitas BPP Kota Samarinda dalam menyesuaikan dengan visi dan misi tujuan penyuluhan pertanian Kota Samarinda termasuk dalam kategori sedang (64% atau 16 dari 25 responden) .
- 2) Responsibilitas dalam menyesuaikan dengan program pembangunan pertanian di BPP Kota Samarinda termasuk dalam kategori seimbang karena responden yang menilai sedang dan rendah (44% atau 11 dari 25 responden menilai jumlahnya sama yaitu 44% (11 dari 25 responden).
- 3) Responsibilitas dalam menyesuaikan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyuluhan tingkat kecamatan BPP Kota Samarinda berada pada kategori tinggi (72% dari 25 responden)

Hasil analisis di atas responsibilitas BPP Kota Samarinda cukup sesuai dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Hal ini dapat dilihat dari ketiga item indikator responsibilitas tidak ada yang menunjukkan hasil rendah. Responsibilitas kinerja BPP tergambar dari realisasi kerja penyuluh pertanian yang melaksanakan kegiatan penyuluhan yang cukup sesuai dengan perencanaan serta prinsip-prinsip penyuluhan. Kegiatan yang dilakukan pada umumnya berupa demonstrasi cara, kursus tani, temu karya dan pelatihan kewirausahaan bagi petani. Pada pelaksanaan kegiatannya, kinerja BPP tidak hanya sekedar menyampaikan informasi atau konsep-konsep teoritis, tetapi juga memberikan peluang dan kesempatan serta bimbingan kepada petani untuk mencoba informasi dan teknologi yang berkembang sehingga mereka memperoleh pengalaman kegiatan secara nyata (belajar sambil bekerja) yang sangat bermanfaat bagi petani.

Upaya untuk mendukung nyatanya hal tersebut diperlukan adanya peran aktif masyarakat dan peran pemerintah Kota Samarinda untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat yang sesuai dengan visi misi Kota

Samarinda terutama yang berkaitan dengan alih teknologi (*transfer of technology*) yang saat ini semakin canggih dan pembinaan yang berkelanjutan sesuai tujuan penyuluhan pertanian agar petani menjadi sejahtera (*better farming, better business, better living, better community, dan better environment*).

Kualitas Pelayanan

Berdasarkan hasil analisis penilaian kinerja BPP Kota Samarinda pada indikator kualitas pelayanan pada tahun 2005 diperoleh skor penilaian pada kategori sedang (80% atau 20 dari 25 responden). Artinya di dalam kualitas pelayanan penyuluhan kepada petani masih dijumpai hal-hal yang kurang memuaskan. Pelaksanaan Latihan dan Kunjungan (Laku) belum optimal seperti materi dan da metode yang digunakan berada pada kategori cukup tepat dan layanan yang cukup. Keadaan ini harus dipertahankan agar respon masyarakat terhadap kegiatan dan program penyuluhan di BPP dapat terlaksana dengan baik karena pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan bagi petani dan akan menumbuhkan sikap yang positif terhadap segala kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh BPP Kota Samarinda. Dengan sikap ini diharapkan dalam prosesnya dapat meningkatkan tingkat adopsi inovasi petani Kota Samarinda yang pada akhirnya merasa terpenggil untuk turut berpartisipasi dalam segala kegiatan penyuluhan pertanian. Skor penilaian terhadap kinerja indikator responsivitas BPP disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi jumlah jawaban responden terhadap kinerja BPP Kota Samarinda indikator kualitas pelayanan, 2005.

Kategori Kinerja	Kualitas Pelayanan						Kualitas Pelayanan	
	C ₁		C ₂		C ₃		C	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Tinggi	20	80	2	8	3	12	4	16
Sedang	4	16	11	44	11	44	20	80
Rendah	1	4	12	48	11	44	1	4
Jumlah	25	100	25	100	25	100	25	100

Data pada tabel 4 menunjukkan bahwa :

- 1) Kualitas Pelayanan BPP Kota Samarinda dalam memberikan pelayanan informasi dan penyuluhan yang memuaskan petani termasuk dalam kategori tinggi (80% atau 20 dari 25 responden) .
- 2) Kualitas Pelayanan BPP Kota Samarinda dalam kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada petani di Kota Samarinda termasuk dalam kategori rendah (48% atau 12 dari 25 responden).

- 3) Kualitas Pelayanan BPP Kota Samarinda dalam ketepatan materi dan teknik pelayanan informasi dan penyuluhan pertanian termasuk pada kategori seimbang karena responden yang menilai sedang dan yang menilai rendah jumlahnya sama yaitu 44% (11 dari 25 responden)

Salah satu cara untuk mengantisipasi munculnya kondisi ketidaktuntasan layanan penyuluhan dapat dilakukan dengan optimalisasi kinerja BPP melalui perbaikan atau peningkatan kualitas layanan. Peningkatan ini aspek indikator kualitas layanan ini didasari oleh normatifitas penyuluh sebagai abdi masyarakat yang membantu petani dan keluarganya derta lingkungannya untuk lebih sejahtera, memberikan kemudahan dan menjadi jembatan penghubung antara lembaga pemerintah dengan petani agar instansi/lembaga terkait dapat memberikan bantuan, bimbingan, maupun pinjaman bagi keberhasilan petani dan usahataniannya.

Kinerja BPP

Hasil analisis ketiga indikator kinerja (responsivitas, responsibilitas dan kualitas pelayanan) menunjukkan bahwa secara keseluruhan responden utama menilai selama ini kinerja BPP Kota Samarinda pada kategori sedang (88% atau 22 dari 25 responden), 8% menilai tinggi dan 4% menilai kinerja BPP Kota Samarinda rendah. Kategori tingkat kinerja BPP Kota Samarinda per indikator dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Distribusi jumlah jawaban responden terhadap kinerja BPP Kota Samarinda per indikator kinerja, 2005.

Kategori Kinerja	Indikator Kinerja						Gabungan ke-3 Indikator	
	Responsi- vitas A		Responsi- bilitas B		Kualitas Pelayanan C		A + B + C	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Tinggi	3	12	7	28	4	16	2	8
Sedang	17	68	17	68	20	80	22	88
Rendah	5	20	1	4	1	4	1	4
Jumlah	25	100	25	100	25	100	25	100

Berdasarkan analisis per indikator kinerja dan per sub indikator kinerja maka diperoleh hasil bahwa secara keseluruhan (gabungan dari 3 indikator) menunjukkan bahwa kinerja BPP Kota Samarinda berada pada kategori sedang. Dengan demikian kinerja BPP Kota Samarinda berdasarkan indikator responsivitas, responsibilitas dan kualitas pelayanan rendah, karena dari analisis per indikator dan per item (sub indikator) dari kinerja menunjukkan hasil penilaian pada

kategori sedang, yang artinya bahwa kemampuan BPP sudah cukup untuk dapat mengenali kebutuhan petani binaannya, cukup dapat mengembangkan program/kegiatan penyuluhan yang sesuai dengan keinginan/aspirasi petani setempat, dan cukup dalam memberikan pelayanan kepada petani.

Upaya untuk meningkatkan kinerja BPP dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada penyuluh untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya melalui pendidikan nonformal maupun formal dan mempertimbangkan fungsi penyuluh sebagai konsultan dan *konterpart* oleh dinas/instansi terkait dalam penyusunan program, sehingga penyuluh merasa tertuntut untuk menjadi seorang yang spesialis yang mampu menganalisis kebutuhan petani sesungguhnya dan memberikan pelayanan prima bagi pengguna. BPP Kota Samarinda diharapkan dapat mengevaluasi dirinya dan lebih memperhatikan serta meningkatkan kemampuan dan kinerjanya agar petani di wilayah kerjanya masing-masing (WKBPP) dapat lebih meningkatkan tingkat adopsi inovasinya dan lebih sejahtera hidup petani di wilayah binaannya agar eksistensinya (keberadaan) yang dekat dengan masyarakat dapat dioptimalkan sesuai peran dan fungsinya.

Dengan demikian perlunya pengoptimalan kinerja yang lebih berorientasi pada kebutuhan dan aspirasi petani dengan peningkatan pelayanan penyuluhan secara efektif dan efisien tanpa mengabaikan partisipasi masyarakat tani yang disesuaikan kekhasan dan kondisi wilayah kerjanya (WKBPP) dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip penyuluhan pertanian. Perlu perhatian Pemerintah Kota mengenai keberadaan (eksistensi), peran dan fungsi strategis lembaga penyuluhan pertanian khususnya di Kecamatan dan Penyuluh Pertanian dalam meningkatkan kualitas SDM petani dalam membangun sistem dan usaha agribisnis yang berkelanjutan. Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian, terutama dengan diklat dan pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah kerja dan perkembangan dunia pertanian sehingga dapat memberikan wawasan dan keterampilan teknis yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan petani.

KESIMPULAN

Sejalan dengan misi utama pembangunan ekonomi nasional dengan memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha

kecil, menengah dan koperasi dalam menghadapi tantangan globalisasi maka peran dan fungsi BPP sangatlah strategis, mengingat pertanian di Indonesia didominasi oleh usaha skala kecil yang dilaksanakan oleh berjuta-juta petani, maka penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja lembaga penyuluhan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat petani sangatlah penting. Berdasarkan hasil penelitian di BPP yang ada di Kota Samarinda maka diperoleh hasil bahwa kinerja BPP Kota Samarinda dilihat dari indikator responsivitas, responsibilitas dan kualitas pelayanannya berada pada kategori sedang (88 % atau 22 dari 25 responden). Dengan demikian perlu upaya dan kerja keras bersama dari berbagai pihak (instansi, pengusaha/swasta, petani) untuk bersama sama dalam meningkatkan kinerja BPP Kota Samarinda di masa mendatang terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, M. 1991. Psikologi industri. Ed. Library, Yogyakarta.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Kaltim. 2000. Tata laksana penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura. Propinsi Kaltim. Samarinda.
- Luneto, R.N. 1998. Kinerja Bappeda Tingkat II dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (Tesis Program Pascasarjana UGM), Yogyakarta
- Mardikanto, T., 1991. Penyuluhan pembangunan pertanian. UNS Press. Surakarta.
- Mokhtar, M.S. 2001. Kinerja lembaga penyuluhan dan adopsi inovasi kedelai serta implikasinya pada pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur. Tesis Program Pasca Sarjana UGM. Program Studi Ekonomi Pertanian. Yogyakarta. Tidak Dipublikasikan.
- Rafael, LL., 1996. Komunikasi penyuluhan pedesaan. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soebagjo, 1998. Kinerja Dispenda Tk. II dalam menggali sumber pendapatan asli daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah Tesis Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.

Sarkaniputra, M., 1999. Pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian melalui pendekatan partisipasi. Makalah Seminar Nasional Pembangunan Pertanian pada Millenium III. Yogyakarta, Tanggal 21 Agustus 1999.

Vitalaya, dkk. 1998. Penyuluhan pembangunan di Indonesia menyongsong Abad XXI. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara. Jakarta.